UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Rasionalitas Penerima Money Politic: Kritik Etis Berbasis Rule Utilitarianism John Stuart Mill
YUSUF EKO PRASETYO, Dr. Lailiy Muthmainnah, S.Fil.,M.A. ; Drs. Agus Wahyudi, M.Si., M.A., Ph.D.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

INTISARI

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena *money politic* yang masih menjadi masalah dalam setiap diselenggarakannya pemilihan umum. Penelitian ini menggunakan teori utilitarianisme John Stuart Mill khususnya *rule utilitarianisme* untuk menganalisis problematika rasionalitas pemilih yang terpengaruh *money politic* dalam kontestasi Pemilu. Pandangan utilitarianisme Mill digunakan untuk mengkaji paradoks yang terjadi dalam pengambilan keputusan pemilih yang terpengaruh *money politic* dengan memusatkan pada aspek pemajuan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh melalui pertimbangan konsekuensi tindakan.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif filsafat dengan model penelitian mengenai masalah aktual. Peneliti menggunakan metode heuristika filosofis dalam upaya memahami beragam kepustakaan yang terkait dengan topik penelitian. Adapun unsur-unsur metodis yang digunakan, yaitu: deskripsi, interpretasi, heuristika, dan refleksi.

Penelitian ini menghasilkan dua kesimpulan. Pertama, rasionalitas penerima *money politic* beroperasi sebagai bentuk *act utilitarianism* dan terjebak dalam egoisme etis yang mengakumulasi kebahagiaan hanya untuk pribadi masing-masing. Kedua, hasil analisis *rule utilitarianisme* terhadap rasionalitas penerima *money politic* menunjukkan bahwa terdapat pelanggaran aturan yang mengakibatkan kerugian secara *indirect strategy* bagi individu maupun masyarakat secara kolektif. Tindakan menerima *money politic* tidak sejalan dengan instrumen pemerintah untuk meningkatkan pembangunan negara melalui pemilihan umum secara keseluruhan dan tidak sesuai dengan prinsip yang termuat dalam Undang-Undang tentang pemilihan umum sebagai aturan yang diimplikasikan dalam rule utilitarianism. Ketiga, *money politic* diidentifikasi hanyalah sebagai *lower pleasure* bagi masyarakat karena hanyalah kebahagiaan yang bersifat materialistik. Selain itu terdapat pembanding kebahagiaan yang lebih besar yang dimaksud dalam utilitarianisme sebagai *higher pleasure* yang didapat secara tidak langsung dari pembangunan negara ketika masyarakat menolak *money politic*.

Kata Kunci: money politic, rasionalitas pemilih, utilitarianisme, higher pleasure.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Rasionalitas Penerima Money Politic: Kritik Etis Berbasis Rule Utilitarianism John Stuart Mill
YUSUF EKO PRASETYO, Dr. Lailiy Muthmainnah, S.Fil.,M.A. ; Drs. Agus Wahyudi, M.Si., M.A., Ph.D.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

ABSTRACT

The background of this research is motivated by the phenomenon of money politics, which remains a problem in every general election. This researh employs John Stuart Mill's utilitarian theory, specifically rule utilitarianism, to analyze the issue of voter rationality influenced by money politics in electoral contests. Mill's utilitarian perspective is used to examine the paradoxes that arise in the decision making of voters influenced by money politics, focusing on the promotion of the overall welfare of society through consideration of the consequences of actions.

This research is philosophical qualitative research with a concrete model problem. The researcher employs a philosophical heuristic approach to understand the diverse body of literature related to the research topic. The methodological elements utilized include description, interpretation, heuristics, and reflection.

This research resulted in three conclusions. First, the rationality of recipients of money politics operates as a form of act utilitarianism and is trapped in egoism ethics that seeks to accumulate happiness solely for the individual. Second, the results of a rule utilitarian analysis rationality of recipients of money politics indicate that there are rule violations that result in indirect harm to both individuals and society as a whole. The act of accepting money politics is inconsistent with the government's instruments for advancing national development through the electoral process as a whole and does not align with the principles enshrined in the Election Law which serves as the rule implied by utilitarianism. Third, money politics is identified merely as a "lower pleasure" for society, as it constitutes only materialistic happiness. Furthermore, there is a greater form of happiness referred to in utilitarianism as "higher pleasure" that is indirectly derived from national development when society rejects money politics.

Keyword: *money politics, voter rationality, utilitarianism, higher pleasure.*